

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara memiliki tujuan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah satu ukuran untuk mengukur pendapatan nasional. Dari pendapatan nasional dalam suatu negara yakni dapat menunjukkan seberapa besar aktivitas perekonomian secara keseluruhan di negara tersebut. Konsep dari pendapatan nasional adalah suatu ukuran yang sering dipakai untuk menunjukkan satu-satunya indikator dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses, bukan hanya berupa suatu gambaran ekonomi pada suatu periode tertentu, memiliki perkembangan atau perubahan dan penggunaan waktu (Boediono, 1999).

Menurut Suparmoko (2002) pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Pembangunan ekonomi yang pada hakekatnya bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Masalah dari pertumbuhan ekonomi di suatu daerah disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya dengan melalui kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah tersebut harus dikenali dan

diidentifikasi secara tepat agar pertumbuhan ekonomi dapat tercapai di suatu daerah.

Sementara itu pembangunan daerah merupakan pembangunan yang dimaksud untuk dapat mendorong, memberdayakan masyarakat daerah, menumbuhkan prakarsa serta meningkatkan partisipasi masyarakat dapat membangun daerahnya, dan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dapat dilaksanakan oleh daerah meliputi dalam berbagai bidang, yakni salah satunya pembangunan ekonomi. Menurut Blakely (Kuncoro, 2001), pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta seluruh komponen masyarakat untuk dapat mengelola berbagai sumber daya yang terdapat di daerahnya dan membentuk suatu pola kemitraan guna menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi daerah tersebut.

Pemerintah pusat membuat suatu kebijakan dimana pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk dapat mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan desentralisasi. Hal ini dilakukan dengan harapan kedepannya daerah akan memiliki kemampuan untuk dapat membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai dengan daerah otonomi yang nyata. Pengertian otonomi daerah menurut “undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Syafrizal (1997) menyatakan bahwa untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah dengan cara memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dengan mengingat potensi masing-masing daerah berbeda maka sebaiknya masing-masing daerah harus menentukan kegiatan sektor dominan. Dalam menunjukkan bahwa daerah otonom dapat berotonomi dapat dilihat pada kemampuan keuangan daerahnya. Hal ini daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk dapat lebih mencari sumber-sumber keuangan daerah, sedangkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat lebih di minimalisir.

Penerapan otonomi daerah memiliki konsekuensi yakni dari setiap daerah lebih ditekankan untuk dapat meningkatkan PAD agar dapat membiayai urusan dari rumah tangganya sendiri. Upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ini dapat menunjukkan terciptanya tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Dalam upaya peningkatan tersebut dilakukan dengan cara terus menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi sumber daya dan sarana. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebenarnya merupakan eksese dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan “Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, dalam pasal 1 ayat 18 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. “Sumber pendapatan yang diterima daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah”. Berikut ini data Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 33 provinsi di Indonesia tahun 2015-2017.

Tabel 1.1

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 33 Provinsi di Indonesia Tahun

2015-2017

| Provinsi | Pendapatan Asli Daerah | | |
|--------------------|------------------------|------------|------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| ACEH | 11.694.163 | 12.364.564 | 14.291.939 |
| SUMATERA UTARA | 8.480.759 | 10.440.619 | 12.170.582 |
| SUMATERA BARAT | 4.052.249 | 4.624.657 | 6.110.997 |
| RIAU | 6.911.045 | 6.942.927 | 8.859.018 |
| JAMBI | 3.129.719 | 3.203.974 | 4.163.725 |
| SUMATERA SELATAN | 5.990.424 | 6.582.781 | 8.587.020 |
| BENGKULU | 2.180.679 | 2.355.564 | 3.041.325 |
| LAMPUNG | 4.787.308 | 5.588.723 | 6.723.785 |
| KEP. BABEL | 1.886.999 | 1.949.866 | 2.355.579 |
| KEP. RIAU | 2.513.438 | 2.852.614 | 3.201.559 |
| DKI JAKARTA | 44.209.238 | 53.784.706 | 62.466.130 |
| JAWA BARAT | 24.009.981 | 27.694.035 | 30.540.901 |
| JAWA TENGAH | 16.828.154 | 19.632.577 | 23.467.518 |
| DI YOGYAKARTA | 3.400.015 | 3.899.193 | 4.988.379 |
| JAWA TIMUR | 22.228.450 | 24.962.122 | 27.932.994 |
| BANTEN | 7.328.221 | 8.656.395 | 9.790.923 |
| BALI | 4.967.967 | 5.249.018 | 6.222.704 |
| NTB | 3.448.586 | 3.949.997 | 4.791.395 |
| NTT | 3.315.669 | 3.875.554 | 4.722.737 |
| KALIMANTAN BARAT | 4.073.147 | 4.494.429 | 5.095.395 |
| KALIMANTAN TENGAH | 3.252.748 | 3.548.505 | 4.086.898 |
| KALIMANTAN SELATAN | 4.746.943 | 5.218.111 | 5.703.186 |
| KALIMANTAN TIMUR | 9.376.313 | 7.985.728 | 8.098.900 |
| SULAWESI UTARA | 2.527.959 | 2.885.186 | 3.556.373 |
| SULAWESI TENGAH | 2.901.588 | 3.175.693 | 3.579.386 |
| SULAWESI SELATAN | 6.105.815 | 7.162.589 | 8.901.929 |
| SULAWESI TENGGARA | 2.471.389 | 2.809.721 | 3.545.198 |
| GORONTALO | 1.389.324 | 1.584.308 | 1.831.693 |
| SULAWESI BARAT | 1.473.750 | 1.688.607 | 1.813.837 |
| MALUKU | 2.132.589 | 2.744.943 | 2.860.027 |
| MALUKU UTARA | 1.801.248 | 2.022.258 | 2.864.176 |
| PAPUA BARAT | 5.840.353 | 6.740.387 | 6.888.868 |
| PAPUA | 11.805.767 | 12.567.840 | 13.968.877 |

Sumber: BPS, tahun 2015-2017, diolah

Berdasarkan tabel 1.1 di atas diketahui bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai PAD paling tinggi di bandingkan dengan provinsi lainnya. Provinsi DKI Jakarta menunjukkan nilai PAD pada tahun 2015 sebesar 44.209.238, tahun 2016 sebesar 53.784.706, dan tahun 2017 sebesar 62.466.130.

Sementara, nilai PAD yang paling rendah adalah provinsi Gorontalo. Nilai PAD provinsi Gorontalo pada tahun 2015 sebesar 1.389.324, tahun 2016 sebesar 1.584.308, dan tahun 2017 sebesar 1.831.693. Berdasarkan dengan fenomena yang terjadi tersebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penting untuk di bahas dalam makro ekonomi, khususnya dalam analisis perekonomian suatu wilayah. “Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 pasal 10 menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk melakukan pembangunan daerah (*capital investment*) antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat”. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasi bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk dapat mendanai seluruh kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Maimunah (2006) menyatakan pasalnya segala kebijakan dalam penggunaan semua dana dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

Tujuan dari dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan dapat digunakan dengan bijak, secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan dalam menggunakan dana tersebut harus secara transparan dan akuntabel, dengan berlakunya desentralisasi maka pemerintah daerah diharapkan lebih mampu dalam menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu cara untuk dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan perekonomian yang telah terlaksanakan maka dibutuhkan adanya alat ukur untuk dapat mengukur keberhasilan pembangunan perekonomian tersebut. PDRB merupakan salah satu alat ukur yakni data PDRB dapat memberikan gambaran-gambaran keadaan ekonomi dalam satu wilayah, baik di masa lalu maupun sekarang yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan, evaluasi dan target yang akan dicapai pada masa berikutnya. Sukirno (2003) berpendapat bahwa besaran PDRB setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi dari masing-masing daerah.

Selain PDRB yang menjadi alat ukur pembangunan di bidang ekonomi, ada terdapat faktor lain yaitu investasi juga dianggap penting untuk menjadi penggerak roda pembangunan di bidang ekonomi. Investasi merupakan strategi yang tepat bagi negara-negara berkembang, dengan adanya investasi proses pembangunan ekonomi di negara berkembang

akan menjadi lebih cepat. Menurut Sariningrum (2010) investasi atau penanaman modal adalah motor penggerak suatu perekonomian, dengan banyaknya investasi yang direalisasikan di suatu negara maka dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan sedikitnya investasi akan menunjukkan lambannya laju pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan paparan diatas, maka penelitian ini bertujuan guna untuk menganalisis pengaruh faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini berjudul “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatam Asli Daerah (PAD) di Indonesia tahun 2010-2017 (Studi kasus 33 provinsi)*”

B. Batasan Masalah

Dengan mengingat banyaknya permasalahan yang dapat dibahas mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka penulis disini membatasi permasalahan tersebut dengan variabel depedennya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), lalu variabel independennya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Invetasi. Data yang penulis gunakan adalah data tahunan yaitu dari tahun 2010-2017 di 33 provinsi di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah di 33 provinsi?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah di 33 provinsi?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah di 33 provinsi?
4. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di 33 provinsi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisa seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah di 33 provinsi
2. Menganalisa seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah di 33 provinsi
3. Menganalisa seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah di 33 provinsi

4. Menganalisa seberapa besar pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di 33 provinsi

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadikan penulisan ini menjadi acuan dalam membuat karya ilmiah maupun penelitian selanjutnya bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lebih dari itu juga untuk dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas tentang hal yang telah diteliti, untuk bisa membandingkan teori yang diterima di lapangan maupun yang diperoleh selama masa kuliah.

b) Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan apa yang dapat dilakukan

atau diterapkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Indonesia.